

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	KORAN TEMPO	2	22-8-2002

Ekspor Pasir Laut Dibatasi Mulai Besok

JAKARTA — Pemerintah membatasi ekspor pasir laut dari Riau, Sumatra, mulai besok. Pemerintah daerah yang menentukan seluruh kebijakannya.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Ferry Yahya mengatakan, keputusan yang dikeluarkan besok ini hanya berlaku hingga Desember. Jatah tahun ini hanya 26 juta meter kubik. Tahun depan, alokasinya dikeluarkan dengan surat keputusan baru.

Dia mengatakan, dalam peraturan, yang berhak menentukan volume ekspor pasir laut nasional adalah pemerintah daerah. Termasuk, zona penambangan, potensi pemegang kuasa penambangan, kemampuan antarmuat kapal keruknya, dan lain-lain. Masa evaluasi surat ini tiga bulan.

"Dari pedoman tersebut, pemerintah daerah menentukan alokasi volume eksportnya," ujarnya kapda *Koran Tempo* di Jakarta kemarin.

Kebijakan pemerintah mengatur ekspor pasir laut ini lantaran

banyaknya pasir ilegal yang dijual ke Singapura. Seperti pernah ditulis koran ini, kebutuhan pasir laut Singapura untuk reklamasi pantainya hingga 2010 mencapai 7,24 miliar kubik.

Dengan begitu, wilayah Singapura akan 31 persen dari sekarang atau 180 kilometer persegi. Dari pasir Riau yang digunakan, ternyata 90 persennya ilegal. Yang tercatat hanya 28-75 juta meter kubik senilai Sin\$ 34,16 juta. Akibatnya, kerugian negara Sin\$ 1,765 miliar atau sekitar Rp 9 triliun sejak 1978-2001. Potensi pasir laut di Riau mencapai 1,2 triliun meter kubik.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Penambang dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia Erma Hidayat yang dimintai komentarnya mengatakan, alokasi volume ekspor tersebut tidak benar. Alasannya, kebijakan tadi hanya akan menambah birokrasi baru dan membuka peluang kolusi baru karena bisa diperjualbelikan.

"Alokasi volume ini tidak menyelesaikan masalah, karena masalah ekspor pasir laut sudah

seperti lingkaran setan, jadi susah beresnya," ujarnya.

Menurut dia, masalah ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Misalnya, pemerintah Singapura menentukan volume pasir yang diimpor dari Indonesia. Kemudian, penguasa pelabuhan di Singapura mensyaratkan surat asal barang bagi kapal yang membawa pasir laut, sehingga tercatat dengan baik.

Selama ini, katanya, kapal yang membawa pasir laut bebas masuk. Ia yakin dengan persyaratan tersebut, masalah ekspor pasir laut bisa diselesaikan.

"Situasi tidak beres ini memang diciptakan oleh Singapura. Mereka pura-pura tidak tahu," ujarnya.

Tapi bagi Ferry, yang penting dibenahi dahulu kegiatan eksportnya. Setelah itu, soal kuasa penambangan, karena masih banyak pemilik yang melebihi kemampuannya. "Kemampuan hanya satu juta ton, tetapi yang diekspor 7 juta." ● syakur usman